ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA YAYASAN BUMIMAITRI TANJUNGPINANG

SKRIPSI

OLEH:

<u>CHARVIN</u> NIM: 15622159



ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA YAYASAN BUMIMAITRI TANJUNGPINANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

CHARVIN NIM: 15622159

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN T A N J U N G P I N A N G 2 0 1 9

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA YAYASAN BUMIMAITRI TANJUNGPINANG

Diajukan kepada:

Panitia Komisi Ujian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Oleh:

NAMA

: CHARVIN

NIRM

: 1510099622159

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Bambang Sambodo, S.E, M.Ak

NIDK. 8833900016 / Asisten ahli

Pembimbing Kedua,

Ranti Utami, S.E, M.Si, Ak. CA

NIDN. 1004117701 / Lektor

Menyetujui,

Ketua Program Studi,

Sri Kurnia, S.E., Ak.M.Si., CA NIDN. 1020037101 / Lektor

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA YAYASAN BUMIMAITRI TANJUNGPINANG

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA: CHARVIN NIRM: 1510099622159

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Empat Belas Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Bambang Sambodo, S.E, M.Ak NIDK. 8833900016 / Asisten ahli Sekretaris,

Masyitah As Sahara S.E, M.S.i.

NIDN, 1010109101 / Asisten ahli

Anggota,

Eka Kurnia Saputra, S.T, MM

NIDN, 1011088902 / Asisten ahli

Tanjungpinang, Agustus 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,

Ketua,

Charly Machinda, S.E., M.Ak. Ak.CA

NIDN. 1029127801 / Lektor

SURAT KETERANGAN PENELITIAN No. 045/YBM-P/111/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fendy, S.Sos

Jabatan : Seketaris Yayasan

Perusahaan : Yayasan Bumimaitri

Alamat : Jl. Ir.sutami No.38, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Charvin

NIM : 15622159

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan

Adalah benar telah melakukan penelitian sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul:

'ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA YAYASAN BUMIMAITRI'

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 19 April 2019

Yayasan Bumimaitri

(Fendy, S.Sos)

Seketaris Yayasan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kuucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu Ya Tuhan, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat aku kukasihi dan sayangi

Papa dan Mama Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini untuk papa dan mama yang telah memberikan kasih dan sayang, dukungan serta cinta kasih yang diberikan yang tak terhingga yang tidak mungkin terbalas dengan selembar kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bahagia ©©

Sahabat-sahabat Thesis Fighter

Untuk sahabat-sahabatku sekalian, Tiada yang paling menyenangkan saat kumpul akur bersama, walaupun kadang-kadang kita bertengkar, tapi hal itu selalu memberikan warna yang ngga akan bisa digantikan dengan apapun.

Terimakasih dukungannya 🖾 🖾 🖾 🖾

HALAMAN MOTTO

'Badai pasti berlalu'

- Motivasi

'Untuk diriku yang di masa depan, percayalah tidak peduli sesulit apapun masalah yang kamu hadapi, kamu pasti bisa melewatinya'

- Charvin 2018

'Percayalah skripsi tak akan kelar kalau tak dikerjakan'

- Charvin 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul 'ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA YAYASAN BUMIMAITRII' yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program strudi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyususnan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesehatan yang cukup untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
- 3. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I dan III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dan dosen pembimbing 2
- 4. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II dan Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
- 5. Bapak Bambang sambodo, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 6. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

7. Bapak Sakuan, S.Ag selaku ketua yayasan Bumimaitri dan seluruh staf dan guru sekolah Maiteyawira yang telah banyak membantu dan

bekerjasama dalam penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh anggota keluargaku yang terus memberi dukungan mereka kepada

penulis.

9. Sahabat-sahabat dari Thesis Fighter yakni, Boby, Rudy, Sandi, dan Rama

yang terus sabar dalam mendengar keluh-kesah penulis sambil memberi

semangat, doa, dan dukungan mereka sehingga penulis bisa menyelesaikan

skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan, Aulia, Dewi, Murniati, dan Yunia yang terus

menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan

skripsi ini

11. Kakak tingkat, Eric, S.E, yang banyak memberi saran dalam penyusunan

skripsi dan seluruh rekan-rekan Akuntansi kelas Malam satu angkatan

2015 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa-mahasiswi

Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan

Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 17 Juni 2019

.

Penulis

CHARVIN

NIM 15622159

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	. i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	. ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	. iii
HALAMAN PERNYATAAN	. iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	. v
HALAMAN MOTTO	. vi
KATA PENGANTAR	. vii
DAFTAR ISI	. ix
ABSTRAK	. xii
BAB I Pendahuluan	. 1
1.1 Latar belakang	. 1
1.2 Rumusan masalah	. 6
1.3 Batasan masalah	. 6
1.4 Tujuan penelitian	. 6
1.5 Kegunaan penelitian	. 7
1.5.1 Kegunaan ilmiah	. 7
1.5.2 Kegunaan praktis	. 8
1.6 Sistematika penulisan	. 8
BAB II Tinjauan pustaka	. 10
2.1 Tinjauan teori	. 10
2.1.1 Pengertian GCG	. 10
2.1.2 Prinsip dasar GCG	. 11
2.1.3 Tahap-tahap penerapan GCG	. 15
2.1.4 Hubungan GCG dengan teori lainnya	. 19
2.1.5 Yayasan	. 20
2.1.5.1 Pengertian yayasan	. 20
2.1.5.2 Organ-organ yayasan	. 22
2.1.5.3 Kegiatan usaha yayasan	. 24

2.1.5.4 Pengaturan hukum tentang yayasan di Indonesia	27
2.2 Kerangka penelitian	28
2.3 Penelitian terdahulu	31
BAB III Metodologi penelitian	34
3.1 Jenis penelitian	34
3.2 Jenis data	36
3.3 Teknik pengumpulan data	36
3.4 Populasi	38
3.5 Definisi operasional konsep	38
3.6 Teknik pengolahan data	42
3.7 Jadwal penelitian	43
BAB IV Hasil dan pembahasan	44
4.1 Profil yayasan Bumimaitri	44
4.1.1 Sejarah singkat yayasan Bumimaitri	44
4.1.2 Visi dan misi yayasan Bumimaitri	44
4.1.3 Struktur sekolah Maitreyawira	46
4.2 Hasil penelitian	47
4.2.1 Transparansi	47
4.2.2 Akuntanbilitas	49
4.2.3 Tanggung jawab	50
4.2.4 Kewajaran	52
4.2.5 Kemandirian	54
4.3 Pembahasan	55
4.3.1 Transparansi	55
4.3.2 Akuntanbilitas	58
4.3.3 Tanggung jawab	61
4.3.4 Kewajaran	64
4 3 5 Kemandirian	66

BAB V Penutup	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

ABSTRAK

CHARVIN, 15622159

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA YAYASAN BUMI MAITRI TANJUNGPINANG

Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, 2019.

(xiii + 70 Halaman + 1Tabel + 2 Gambar + 4Lampiran)

Kata Kunci: Analisis penerapan, GCG, Yayasan.

Upaya meningkatkan nilai suatu perusahaan sangat terkait dengan mekanisme Good Corporate Governance. Lemahnya Good Corporate Governancesering disebut sebagai penyebab terjadinya beberapa skandal akuntansi yang terungkap akhir-akhir ini. Skandal akuntansi tersebut menunjukan bahwa penerapan Good Corporate Governance yang rendah dapat berdampak buruk bagi nilai perusahaan.

Setiap organisasi yang berorientasi laba maupun non laba dituntut dapat menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagai bentuk akuntanbilitas organisasi terhadap para pemangku kepentingan (Stakeholders). Good Corporate Governance adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pemangku kepentingan (Stakeholders) demi tercapainya tujuan organisasi.

Karena begitu pentingnya Good Corporate Governance di dalam menjalankan suatu usaha, maka peneliti memilih Yayasan Bumimaitri sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsipprinsip Good Corporate Governance di Yayasan Bumimaitri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara semi-terstruktur.

Hasil penelitian menunjukan Yayasan Bumimaitri telah menerapkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Akan tetapi masih ditemukan kekurangan dalam prinsip transparansi dan kewajaran yang diterapkan yayasan, seperti tidak melibatkan semua karyawan dalam rapat maupun sosialisasi kebijakan yayasan, dan penugasan karyawan yang belum sesuai kualifikasi pendidikan mereka.

Referensi : 24 buku dan 10 jurnal

Dosen Pembimbing 1 : Bambang sambodo, S.E., M.Ak Dosen Pembimbing 2 : Ranti utami, S.E., M.Si.Ak, CA.

ABSTRACT

CHARVIN, 15622159

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON BUMIMAITRI FOUNDATION TANJUNGPINANG

Essay. Institute of Economic Science (STIE) Pembangunan, 2019.

(xiii + 70 Pages + 1 Table + 2 Pictures + 4 Attachments)

Keywords: Internal control, Grants and Social Aid

An effort to increase the company value is strongly associated with Good Corporate Governance mechanism. Poor Good Corporate Governance is often referred as the cause of several accounting scandals that revealed lately. The accounting scandals show that the low implementations of Good Corporate Governance may adversely affect the value of the company.

Every organization either profit oriented or non-profits are required to imply the Good Corporate Governance (GCG) as a form of organizational accountability to stakeholders. Good Corporate Governance is a system, process, and a set of rules that govern the relationship between various stakeholders for the achievement of organizational goals.

Because of the importance of Good Corporate Governance in running a business, the researcher chooses Bumimaitri Foundation as a research object. This study aims to determine the applications of the principles of Good Corporate Governance in Bumimaitri Foundation. This study used a qualitative approach with a semi-structured interview technique.

The results showed that Bumimaitri foundation has implemented transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. But still found flaws in the principle of transparency and fairness that applied in the foundation, as it does not involve all employees in meetings and socialization of foundation policy and not all employees have the appropriate assignment match with their educational qualifications.

Reference : 24 books and 10 journals

Supervisor I : Bambang sambodo, S.E., M.Ak Supervisor II : Ranti utami, S.E., M.Si.Ak, CA.

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir ini, istilah tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) semakin terkenal. Tidak hanya terkenal, tetapi istilah tersebut juga ditempatkan di posisi yang vital dan seringkali dijadikan patokan keberhasilan suatu perusahan. Hal itu, setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, kegagalan penerapan GCG di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini menyebabkan krises ekonomi dunia. Di antaranya, sistem regulasi yang relatif lemah dan terkadang tumpang tindih, pelaksanaan Standar Akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, praktek bisnis yang kurang mengacu pada standar yang baik, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak stakeholders. Kedua, GCG merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk berkembang sehingga bisa menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global - terutama bagi perusahaan yang telah mampu *go public*.

Berdasarkan kepercayaan-kepercayaan di atas itulah maka tidak mengherankan jika selama tahun 1990-an, tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif datang secara berturut-turut. Mereka yang menyuarakan hal itu di antaranya adalah berbagai lembaga investasi baik nasional maupun internasional, termasuk institusi setingkat *World Bank*, IMF, OECD, dan APEC. Mereka yakin bahwa untuk menolong perusahaan dan perekonomian

negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Maka perusahaan harus menerapkan beberapa prinsip umum dalam CG seperti kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan perhatian terhadap pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan meningkatkan daya saing perusahaan menjadi lebih tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan stakeholders. Tentunya, lembaga-lembaga besar itu tak asal bicara. Namun, apa sebetulnya GCG itu sendiri? Apa prinsip-prinsip dasar yang dikandungnya? Lantas, apa manfaat menerapkan GCG? Semua itu akan lebih di jelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Good Corporate Governance (GCG) mendapatkan perhatian luas setelah terjadinya berbagai kejadian seperti krisis moneter di Indonesia ataupun skandal Enron di Amerika Serikat. Untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa maka prinsip-prinsip GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran harus diterapkan baik dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit GCG berkaitan dengan internal perusahaan. Sedangkan dalam arti luas GCG berkaitan dengan para stakeholders' perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat selaku stakeholders.

Sangat jelas bahwa perhatian terhadap corporate governance belakangan ini terpicu oleh skandal spektakuler perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan *Eropa. Cadbury Report* (UK) dan *Treadway Repor* (US) secara mendasar

menyebutkan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik seperti *Enron*, *Worldcom*, *Tyco*, *London* & *Commonwealth*, *Poly Peck*, dan *Maxwell*, dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.

Di Indonesia sendiri isu dan praktik GCG telah mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). CGPI awards misalnya, merupakan salah satu kompetisi tahunan yang di ikuti berbagai perusahaan ternama di Indonesia baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara yang bertujuan memberikan penilaian dan penghargaan terhadap praktik GCG di perusahaan.Sedangkan untuk pedoman praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara telah di buat beberapa peraturan yang berada di bawah koordinasi Kementrian BUMN.

Yayasan bumi maitri didirikan pada tanggal 10 Juni 2007 oleh Pdt. Sakuan, S.Ag ditanjungpinang, yayasan ini mengelola sekolah maitreyawira dalam bidang pendidikan, pada awalnya sekolah maitreyawira hanya memiliki 3 tingkat pendidikan yaitu PGTK, SD dan SMP.

Pada tahun 2010 yayasan bumi maitri membuka tingkat pendidikan SMK yang memiliki jurusan TKJ, Akutansi, dan Pemasaran. Dan pada tahun 2011membuka tingkat pendidikan SMA. Pada tahun 2013 yayasan bumi maitri meresmikan gedung baru SMA dan SMK Maitreyawira yang sekarang berada di belakang restaurant Bumi Maitri dengan di resmikan oleh walikota tanjungpinang

Hj. Drs. Suryatati A Amanan, sekarang sekolah Maitreyawira masih dalam proses pembangunan penambahan ruang kelas baru yang dikarenakan tiap tahunnya jumlah siswa yang semakin meningkat.

Adapun, visi yayasan Bumimaitri adalah 'berupaya untuk mewujudkan keberhasilan dan kesejahteraan anak didik dengan mempraktekkan nilai-nilai hidup asali yang universal sehingga menjadi manusia yang sejati, bajik, dan indah'. Sedangkan misi dari yayasan tersebut adalah: satu, mengabdikan diri untuk mengembangkan hati nurani, afeksi kognisi anak didik. Dua, menggali dan mengembangkan bakat keterampilan anak didik secara proposional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Tiga, melalui proses belajar mengajar membentuk kepribadian dan karakteristik yang kreatif, cerdas, sehat jasmani, dan rohani serta memiliki moralitas yang tinggi.

Yayasan yang menjadi subjek penelitian ini adalah badan hukum yang terikat berbagai bentuk hukum dalam menjalankan usahanya di kota Tanjungpinang, Indonesia. Yayasan ini setidaknya sudah sebelas tahun berdiri hingga tahun 2018 merupakan yayasan yang terus bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Dengan predikat sebagai yayasan yang telah berdiri di atas lima tahun, menjadi suatu hal yang menarik untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan tata kelola perusahaan pada yayasan tersebut.

Good Corporate Governance merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Karyawan, dan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) lainnya (Darmawan, 2013). Menurut Darmawan ada dua alasan mengapa perusahaan perlu menerapkan *Good Corporate Governance*. Pertama, untuk mencapai keberhasilan harus memiliki formula yang baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan pedoman atau bisa digunakan sebagai formula untuk menciptakan pedoman bagi pengelola perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepentingan stakeholders. Kedua, untuk mengurangi resiko dan ancaman yang dapat merugikan perusahaan, maka perlu diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan menurut Heriyanto, perusahaan harus menerapkan *Good Corporate Governance* untuk tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bisa melayani *client* dengan baik pula (Heriyanto, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan yayasan Bumimaitri sebelumnya, diketahui masih ada kendala dalam keterbukaan informasi yayasan. Dimana pihak pengurus yayasan jarang memberikan informasi yang jelas mengenai sistem manajemen dan kebijakan yang ada. Hal ini jelas tidak sesuai dengan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yakni prinsip transparansi. Padahal tata kelola perusahaan yang baik sangat penting dalam menjalankan suatu usaha. Dengan adanya transparansi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholders kepada yayasan sekaligus menjaga hubungan baik antara karyawan dengan pihak pengurus/manajemen untuk meningkatkan mutu

perusahaan. Sehingga peneliti menjadi tertarik pada penerapan *Good Corporate Governance* di yayasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik dan selanjutnya merumuskan hal tersebut kedalam penelitian yang berjudul 'ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA YAYASAN BUMIMAITRI TANJUNGPINANG'.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana penerapan *good corporate governance* pada Yayasan Bumimaitri?
- 2. Apakah penerapan *good corporate governance* pada Yayasan Bumimaitri telah sesuai dengan pedoman *good corporate governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada data yang diambil dari yayasan Bumimaitri pada tahun 2019 dengan berpusat pada lima prinsip *good corporate governance* yaitu: *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntanbilitas), *responsibility* (tanggung jawab), *fairness* (kewajaran), dan *independency* (kemandirian).

Yayasan Bumimaitri memiliki lima tingkat sekolah yakni: PGTK, SD, SMP, SMK, dan SMA yang semuanya dibawah pengawasan Badan Pelaksana Harian (BPH). Sumber penelitian ini hanya berfokus pada unit BPH dan karyawan-karyawan tingkat SMP saja.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui penerapan good corporate governance pada Yayasan Bumimaitri.
- 2. Untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* pada Yayasan Bumimaitri yang telah sesuai dengan pedoman *good corporate governance* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

- Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis terutama mengenai implementasi prinsip dan praktik terbaik pada Yayasan Bumimaitri
- 2. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan

referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi orangorang yang berminat terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keyakinan untuk peningkatan akuntabilitas dan kinerja serta dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.
- 2. Untuk auditor internal, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam membantu auditor internal mewujudkan *good corporate governance* (GCG).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, peneliti membagi kedalam beberapa bab. Adapun sistematika penulisan pada penelitian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan penelitian yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara ilmiah dan praktis, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dipaparkan tinjauan teori, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu sebagai acuan didalam melakukan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, definisi konsep yang terkait dengan penelitian ini, metode pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas gambaran umum objek penelitian dan dilakukan analisis data.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan pencapaian hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut the *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Bunasor, S. (2011) *good corporate governance* adalah "sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kelangsungan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota the *stakeholders*" non-pemegang saham" (Sutojo, SIswanto, & Aldridge, 2015).

Menurut Cadbury *Committee of United Kingdom*, dalam Hery (2017) GCG adalah "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hakhak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan" (Tjager & Nyoman, 2013).

Finance Committee on Corporate Governance Malaysia (Salem & Hisyam, 2012) Menjelaskan bahwa GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas

perusahaan.Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya".

Dalam Per-01/MBU/2011 tahun 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa "Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha"(BPKP, 2012).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate governance merupakan: Suatu sistem yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para stakeholder lainnya, untuk memeriksa kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan, sekaligus penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, beserta pengukuran kinerjanya sehiungga dapat menjadi pedoman dasar suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

2.1.2 Prinsip dasar GCG

Governance merupakan proses yang dipengaruhi oleh top management dalam menyampaikan pengarahan, dan pengawasan terhadap pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, ia juga merupakan proses yang dipengaruhi

oleh direksi dalam menyampaikan pengarahan, dan pengawasan terhadap manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa *corporate governance* meliputi hubungan dalam manajemen antara lain: direksi, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. (Salem & Hisyam, 2012)

Good corporate governance memiliki nilai-nilai positif untuk menjaga konsistensi serta profesionalisme perusahaan dalam melakukan berbagai macam tindakan menuju kearah kinerja yang lebih baik.Hal ini didasarkan bahwa dalam GCG terdapat lima prinsip, yaitu pinsip kewajaran, keterbukaan informasi, dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban, serta indenpendensi yang jika diterapkan secara baik dan benar oleh suatu perusahaan maka akan membawa perusahaan tersebut kearah kemajuan dan apabila perusahaan tidak mau bekerja dengan menerapkan prinsip GCG maka berbagai potensi negatif akan berkembang dan selanjutnya dapat mempengaruhi etika kerja dari sumber daya perusahaan.

Sejak Indonesia berada dalam krisis ekonomi beberapa tahun silam, maka good corporate governance menjadi bagian yang sangat penting dalam melakukan pembenahan dan pengembangan pengelolaan perusahaan. Setiap organ perusahaan harus berusaha mencerminkan prinsip-prinsip GCG tersebut. Sebagian besar perusahaan yang tidak stabil, disebabkan oleh sikap dan cara pengelolaan yang tidak menerapkan nilai-nilai GCG secara tepat sehingga untuk menjaga agar perusahaan tetap stabil, maka semua kekuatan sumber daya perusahaan secara keseluruhan dan utuh harus mampu menjaga efektivitas, efisiensi dan produktivitas dari asset-liability-equity perusahaan, termasuk cash flow dan profit

perusahaan dalam keseimbangan yang tepat dengan cara-cara pengelolaan yang patuh pada penerapan prinsip-prinsip GCG.

Ketika perusahaan mengalami kegagalan dalam bekerja dengan menerapkan prinsip GCG, maka sistem pengendalian perusahaan sulit mengukur semua resiko secara baik, sistem keuangan perusahaan akan menjadi tidak konsisten, para pelanggan beserta *stakeholders* lainnya akan mempertanyakan etika dan moral pelayanan, serta ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan perusahaan berada dalam pengaruh potensi negatif dan semuanya akan mempengaruhi daya saing, *cash flow*, sumber daya manusia, produksi serta jasa perusahaan, sehingga tidak dapat berjalan dengan baik atau diambang kehancuran.

Peranan penerapan GCG sangat penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam kompetisi pasar global yang semakin kuat pengaruhnya. Melalui penerapan GCG perusahaan akan mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam menciptakan pertumbuhan maupun perkembangan bisnis sesuai target yang telah direncanakan. Peranan GCG selain dapat membuat perusahaan menjadi kuat dan kokoh juga dapat melakukan semua kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang saham maupun stake holders seperti gaji karyawan, biaya-biaya opersional rutin, biaya bunga pinjaman, baik biaya- biaya tetap maupun biaya-biaya tidak tetap lainnya, dengan melalui sistem dan kultur atau budaya korporasi yang terkait dengan etika dan moral serta nilai-nilai penerapan prinsip-prinsip GCG

Dalam kerangka tujuan pengembangan perusahaan ke depan, maka berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja berdasarkan paradigma baru perlu ditetapkan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.Prinsip-prinsip dasar GCG yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency,* dan *fairness* (Daniri & Ahmad, 2013)

Prinsip pertama dalam GCG adalah transparansi transparency). Transparansi adalah prinsip untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Dengan kata lain, perusahaan harus menyediakan informasi dan material yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh paraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip kedua dalam GCG ada; ah akuntabilitas (accountability). Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas berarti perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Prinsip ketiga dalam GCG adalah responsibilitas (*responsibility*).

Responsibilitas berarti perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.Berarti, perusahaan tidak boleh menjalakan bisnis yang bersifat melanggar hukum atau ilegal.Termasuk pula kegiatan bisnis yang membayakan lingkunganSehingga usaha dapat bertahan dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizenship*.

Prinsip keempat dalam GCG adalah independensi (*independency*). Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Prinsip kelima dalam GCG adalah kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Dalam prinsip GCG, *fairness* berarti perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3 Tahap-tahap penerapan GCG

Amat penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat dalam pelaksanaan penerapan GCG.Perusahaan harus melakukan rancangan yang tepat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan dari persiapan, impelementasi, dan evaluasi (Kaihatu & S, 2016).

1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama: 1) Awareness building, 2) GCG diagnostic assessment, 3) GCG manual building.

Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

GCG diagnostic assessment atau tahap pemetaan merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini.Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif.Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkahlangkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun.Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan

antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti berikut ini:

- a. Kebijakan GCG perusahaan
- b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
- c. Pedoman perilaku
- d. Audit committee charter
- e. Kebjakan disclosure dan transparansi
- f. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
- g. Roadmap implementasi

2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama sebagai berikut:

Pertama sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan

direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.

Kedua implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan.Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perusahaan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

Ketiga internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan. (Bunasor, 2011)

2.1.4 Hubungan GCG dengan teori lainnya

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Suwarjono, 2011). Selain itu terdapat juga Teori Stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya.(Wulandari & Ari, 2009)

Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.(Kaihatu & S, 2016)

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai "agent" bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (Tatang Ary Gumanti, 2017). (Jayne, 2010) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa bagi kepentingan mereka serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen.Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham, oleh karena itu

manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Menurut Salem dan Hisyam, teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Salem & Hisyam, 2012).

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder* (Mardiasmo, 2012). *Good corporate governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang (Tatang Ary Gumanti, 2017).

2.1.5 Yayasan

2.1.5.1 Pengertian Yayasan

Menurut C.S.T Kansil dan Christine, bahwa pengertian yayasan atau stichting (belanda), adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan yang menyangkut pada bidang sosial (Chatamarasjid, 2010).

Menurut Subekti, bahwa pengertian yayasan adalah badan hukum yang berada dibawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal (Subekti, 2013).

Menurut Undang-Undang Yayasan dalam Pasal 1 No. 1 adalah sebagai berikut: ("Peraturan UU Yayasan," n.d.)

"Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan demi mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota"

Menurut UU No.16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang Yayasan, Pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk rnencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. ("Pengaturan Hukum Tentang Yayasan di Indonesia," n.d.)

Jadi berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

Yayasan pada dasarnya merupakan bentuk badan hukum yang diakui secara legal oleh pemerintah (Dr.Munir Fuady, S.H., 2012). Sebagai badan hukum, pendirian yayasan harus memenuhi persyaratan. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Sehingga tidak ada dana tercampur antara pihak pendiri

dengan aset yayasan serta ada kejelasan harta, utang, dan modal yayasan. Di samping itu, pendirian yayasan juga harus dilakukan dengan akta notaris sebagai bentuk penetapan kekuatan hukum dari pemerintah(Chatamarasjid, 2010).

Melihat hal di atas, maka yayasan adalah badan hukum atau badan hukum bagi hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah bahwa yayasan merupakan suatu hubungan, suatu hubungan di mana antara pihak-pihak terdapat titik pertalian antara subjek dan objek. Dengan kata lain antara subjek dengan benda, dan bukan benda dengan benda. Dengan demikian jelas, bahwa yayasan mengatur antara subjek dengan kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan pribadi(Samadani, 2013).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli, maka bisa disimpulkan bahwa yayasan termasuk organisasi nirlaba sehingga berbeda dengan organisasi usaha lain yang tujuannya adalah mendapat laba. Oleh sebab itu, tujuan utama yayasan adalah untuk melindungi kepentingan umum dan tidak berfokus mencari keuntungan (laba) walaupun ia berhak mengakui laba.

2.1.5.2. Organ-Organ Yayasan

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Sebelum lahirnya UU No.28 Tahun 2004, organ Yayasan terdiri dari Pendiri, Pengurus, dan Pengawas Internal. Maka yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas dijelaskan dalam: UU

No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 2. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

1. Pembina

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus.Diciptakan organ Pembina, sebagai pengganti pendiri, disebabkan dalam kenyataannya, pendiri yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali, yang diakibatkan karena pendiri meninggal dunia, ataupun mengundurkan diri.Mengenai organ yayasan ini dijelaskan pasal 28 ayat 1 UU Yayasan No.28 Tahun 2004.

(1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Peng urus atau Pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

2. Pengurus

Peranan Pengurus amatlah dominan pada suatu organisasi.Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina.Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina dan pengawas hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Mengenai jabatan pengurus ini telah diatur oleh UU No.28 Tahun 2004 dalam pasal 31 sampai pasal 39.

3. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada Pengurus.Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.Dalam UU Yayasan No.28 Tahun 2004 Organ Pengawas diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 47 ("Undang-Undang Yayasan," n.d.).

2.1.5.3 Kegiatan Usaha Yayasan

Kegiatan usaha yayasan adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjadi organ yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan No.28 Tahun 2004, bahwa kegiatan usaha yang dimaksud adalah untuk tujuan-tujuan yayasan dan bukan untuk kepentingan organ yayasan ("Peraturan UU Yayasan," n.d.).

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menentukan sebagai berikut: 'Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha'. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai peraturan perundang-undangan tentang kegiatan usaha yayasan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan dirubahnya UU Nomor 16 Tahun 2001 dengan UU Nomor 28 Tahun 2004, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU ini substansinya tetap, hanya saja yang dirubah adalah Penjelasan Pasal demi Pasalnya.
- b. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tersebut dalamPenjelasan Pasal Demi Pasal UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tentang Yayasan menjelaskan sebagai berikut: "Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukankegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha laindimana Yayasan menyertakan kekayaannya."
- c. Dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) di atas, dapat disimpulkan bahwa, Organ Yayasan tidak diperbolehkan menjadikan Yayasan sebagai Wadah Usaha dan Yayasan tidak boleh menjalankan kegiatanusaha secara langsung melainkan harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.
- Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan mensyaratkan penyertaan kekayaan Yayasan dalam bidang usaha yang bersifat Prospektif maksimal sebesar 25 (duapuluh lima) %.
- 3. Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan melarang organ-organ Yayasan seperti : Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas

yayasan merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

4. Mengenai Kegiatan Usaha dari Badan Usaha yang didirikan Yayasan, Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasanmenentukan dan memberikan batasan sebagai berikut: Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam yayasan terdapat suatu maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar.Adapun manfaat dari suatu yayasan akan terlihat tergantung kepada bidang kegiatan yang bersangkutan. Ada beberapa kategori bidang kegiatan yayasan yaitu:

- a. Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan, yang bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha pelayanan medik (kesehatan).
- b. Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan, yang bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha pelayanan medis (kesehatan).
- c. Yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan, bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat terutama dalam melestarikan Kebudayaan Bangsa.

- d. Yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, bertujuan ikut membantu Pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama atau peribadatan.
- e. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, bertujuan ingin memebantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah sosial seperti: menyantuni anak yatim, fakir miskin.

2.1.5.4 Pengaturan Hukum Tentang Yayasan di Indonesia

Pada tanggal 6 Agustus 2001, lahirlah undang-undang yang mengatur mengenai Yayasan yakni pada No. 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132 dan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430. Sebelum itu, tidak ada satu pun peraturan perundangan-perundangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia (Dr.Munir Fuady, S.H., 2012).

Selain itu, terlihat dimasyarakat bahwa fungsi atau peranan yayasan diberbagai sektor, seperti di sektor agama, sosial dan pendidikan sangat menonjol. Oleh karena itu, lembaga demikian hidup dan tumbuh sesuai kebiasaaan yang hidup di dalam masyarakat. Namun demikian, tidaklah cukup berarti di Indonesia yang sama sekali tidak ada suatu ketentuan yang mengatur mengenai Yayasan. Sedangkan dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya yayasan,

misalnya Pasal 365, Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat 3 dan Pasal 236 Revisi serta Pasal 2 ayat 7 Undang-Undang Kepailitan (Subekti, 2013).

2.2 Kerangka Penelitian

GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Dan menganut pada *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) *corporate governance* meliputi hubungan dalam manajemen antara lain direksi, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Dan juga bahwa *Governance* merupakan proses yang dipengaruhi oleh *top management* dalam menyampaikan pengarahan, dan pengawasan terhadap pihak manajemen untuk mencapai tujuanperusahaan.

Menganut pada teori *stakehoder*, dimana menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).Dan peran GCG disini adalah sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Dalam kerangka tujuan pengembangan perusahaan ke depan maka berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja berdasarkan paradigma baru perlu ditetapkan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.(Bunasor, 2011) Prinsip-prinsip dasar GCG yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency,* dan *fairness* (Jayne, 2010) Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

YAYASAN BUMIMAITRI Implementasi GCG Prinsip Di GCG Yayasan Bumimaitri Evaluasi Analisis Hasil dan Pembahasan Kesimpulan

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis (2019)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Magdalena Meriani dan Cherrya Dhia Wenny (2016) Mahasiswi jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang dengan judul Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Nirlaba dan Organisasi *Profit Oriented*. Penelitian ini membahas penerapan good corporate governance (GCG) di organisasi nirlaba dan organisasi profit oriented, vaitu pada Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dan Bank Central Asia Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, penerapan good corporate governance (GCG) yang diterapkan Gereja Katolik Paroki Santo Petrus yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan. Telah diterapkan dengan baik, tetapi prinsip independensi belum dapat diterapkan dengan baik. Kedua, penerapan good corporate governance (GCG) pada Bank Central Asia Tbk sudah menerapkan kelima prinsip dengan baik. Ketiga, perbedaan penerapan good corporate governance (GCG) antara Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dan Bank Central Asia Tbk ada pada kelima prinsipnya yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Zulfikar (2015) Mahasiswa Universitas Bina Nusantara dengan judul Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Studi Kasus PT.Bio Farma, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance dilakukan oleh PT Bio Farma. Metode penelitian ini

adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bio Farma yang didukung dengan kuesioner. Hasil yang dicapai berdasarkan analisa kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan di PT Bio Farma terhadap pengimpelemntasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan pedoman *Good Corporate Governance* di PT Bio Farma dan undang-undang BUMN.

Penelitian yang dilakukan oleh Any Maskur (2012) dengan judul Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Usaha Mikro Kecil Dan Menengah studi Kasus pada Mitra Binaan Unit PKBL PT Taspen (Persero). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana hasilnya berupa Tingkat pelaksanaan GCG di UKM Binaan PT Taspen sebagian besar (54%) sudah berkategori baik. Responsibilitas menjadi prinsip yang paling banyak dilaksanakan, sedangkan transparansi menjadi yang paling sedikit dilaksanakan

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Fajarwati (2010) dengan judul Penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Bulog. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan hasil berupa penilaian yakni secara keseluruhan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Perum Bulog telah terlaksana dengan cukup baik namun masih diperlukan peningkatan terutama dalam hal pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Catur Ari W (2009) dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-prinsip *good corporate governance* di PT Pupuk Kujang Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Prinsip-prinsip GCG antara lain tentang belum adanya peraturan pemberian hadiah yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, belum adanya komisaris independen, serta belum di buatnya peraturan tentang *compliances* untuk mencegah *self-dealing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rismawati Simarmata (2009) dengan judul Evaluasi penerapan *Good Corporate Governance* pada Yayasan Pangudi Luhur Semarang, hasil penelitian ini menunjukan bahwa Yayasan Pangudi Luhur Semarang sudah menerapkan empat prinsip *good corporate governance* yakni: transparansi, akuntanbilitas, tanggung jawab, dan kewajaran dengan kriteria sangat baik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis peneeltian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitattif. Metode penelitian merupakan alat yang dapat membantu seorang peneliti guna mendapat hasil dan kesimpulan dari objek yang diteliti. Untuk mengumpulan data-data yang selanjutnya akan diidentifikasi, dianalisis, dan diinterpretasikan, diperlukan sebuah metode-metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan paradigma kualitatif. Menurut(Sugiyono, 2014) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengelola data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain.

Penelitian kualitatif menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Wiratna Sujarweni,2014). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Riadi, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data yang bukan berbentuk angka seperti gambar, narasi, artefak, transkip dan lain-lain yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, observasi, analisis dokumen, dan diskusi terfokus (Riadi 2016),.

Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang

berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2011). Penelitian ini bersifat deskriptif umtuk menganalisa penerapan *good corporate governance* pada yayasan yang bergerak di bidang pendidikanPemilihan studi ini dikarenakan penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan interaksi dengan informan dan juga dapat memberikan informasi yang lebih mendalam. Desain ini cocok untuk menggali informasiinformasi yang melatar belakangi perilaku tertentu dan pendapat informan mengenai masalah tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengamati dan menggkaji data-data faktual tentang gambaran proses penerapan prinsip good corporate governance yang terjadi dilapangan, kemudian mendeskripsikan hasil temuan dilapangan kedalam bentuk tulisan. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengambil data dalam suasana yang wajar dan tanpa manipulasi / merekayasa sesuai situasi, sehingga data yang diperoleh akan memenuhi validasi data yang diperlukan. Dengan kata lain, data yang diperoleh memang benar apa adanya. Upaya untuk memperoleh data yang valid dilakukan dengan menggali informasi setuntas munggkin dan mengambil data sesuai fokus kajian.

Pelaporan data disusun dalam bentuk deskriptif kemudian peneliti menarik kesimpulan. Penggalian informasi secara mendalam, menyeluruh dan lengkap dari masing-masing subjek penelitian akan memberikan hasil penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif didasari oleh pemikiran bahwa pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan fokus penelitian.

3.2 Jenis Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono, 2014). Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang akan dilakukan. Data untuk penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan karyawan-karyawan di Badan Pelaksana Harian (BPH) yang dimiliki yayasan Bumimaitri. Data yang diambil adalah data tahun 2019.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan kejelasan dalam upaya penyusunan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam pemecahan masalah.Literatur tersebut dapat berupa arsip-arsip, buku-buku, koran atau majalah, internet serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

- 2. Penelitian lapangan (*Field Reseach*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan teknik:
 - a. Wawancara, yaitu sebuah percakapan dengan sebuah tujuan. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara baku terbuka yaitu wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur pada penelitian ini diawali dengan peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Subjek yang diwawancara pada penelitian ini khususnya adalah unit Badan Pelaksana Harian (BPH). Wawancara dilakukan dengan unit kerja yayasan yang memang membawahi bidang-bidang penerapan prinsip good corporate governance (GCG).
 - b. Observasi, mengamati secara langsung atau tidak langsung objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang penulis lakukan adalah dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan good corporate governance pada yayasan Bumimaitri.
 - c. Dokumentasi, mengumpulkan dokumen dokumen yang berhubungan dengan penerapan good corporate governance pada yayasan Bumimaitri.
 Data yang dikumpulkan berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, laporan tahunan perusahaan, atau data data lain yang sifatnya materiil serta mendukung proses penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

Penelitian ini akan dilakukan pada Yayasan Bumimaitri yang berlokasi pada Jl.Ir.Sutami no.08, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan riau. Populasinya adalah seluruh karyawan yang bekerja pada bagian Badan Pelaksana Harian (BPH) yayasan tersebut dan seluruh tenaga kependidikan tingkat SMP dengan total 34 orang. Sedangkan sampel adalah sebanyak 20 orang. Untuk penetapan sampel, peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling. Purposive samping adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan teknik ini dengan tujuan agar informan yang dipilih benar-benar sesuai dan tepat dengan kebutuhan penelitian.

Dalam sesi tanya-jawab ini masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam sesi wawancara. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan upaya-upaya yang dirasa perlu untuk menjaga kualitas hasil wawancara antara lain dengan mengumpulkan dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governace* yang dilakukan oleh peneliti sehingga diharapkan mampu meminimalisir kemungkinan jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur dan berbagai hal lainnya yang kiranya akan dapat mengurangi kualitas data.

3.5 Definisi Operasional Konsep

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari prinsip-prinsip: transparansi,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian (reponsibilitas) dan kewajaran (fairness) sehingga tingkat penerapan GCG merupakan perwujudan dari tingkat penerapan/pencapaian prinsip-prinsipnya. Tingkat Penerapan GCG tersebut diperoleh dari analisis hasil wawancara masing-masing prinsip GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.

Konsep penelitian adalah penerapan prinsip good governance, dengan lima indikator yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian (reponsibilitas) dan kewajaran (fairness). Penelitian ini menggunakan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara semi-terstruktur di mana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah diformalkan, sehingga pertanyaan akan lebih terbuka dan lebih memungkinkan untuk berdiskusi dengan orang yang diwawancarai daripada format pertanyaan dan jawaban langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tanya-jawab yang pertanyaanya berhubungan dengan objek yang diteliti. Kemudian peneliti juga menggunakan pengamatan dan dokumentasi untuk memperjelas data yang didapatkan, dan kiranya dapat menambah data-data yang luput dari wawancara.

Poin-poin dari masing-masing prinsip GCG yang ada akan digunakan untuk membuat pertanyaan dalam wawancara penelitian ini. Wawancara yang digunakan merupakan adopsi wawancara dari penelitian terdahulu oleh (Rismawati Simarmata, 2009).

Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat penerapan Prinsip GCG terdiri dari 5 prinsip, yaitu sebagai berikut:

a. Transparansi (Transparency)

Prinsip Transparansi dalam penelitian ini berpedoman kepada 4 (empat) hal utama berikut yaitu:

- Pengungkapan Informasi secara tepat waktu, memadai, dan akurat kepada publik dan akses oleh stakeholders
- 2) Pengkomunikasian kebijakan kepada *stakeholders*
- 3) Penyampaian laporan Pelaksanaan GCG kepada stakeholders
- 4) Penyampaian informasi pelayanan kepada klien dan pemeliharaan kerahasiaan informasi

b. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini berpedoman kepada 4 (empat) poin berikut yaitu:

- Penetapan tanggung jawab karyawan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan
- Mempunyai Kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dalam pelaksanan GCG
- 3) Memiliki ukuran kinerja dan sistem reward and punishment
- 4) Memegang prinsip GCG dan etika bisnis perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Responsibilitas (Responsibility)

Prinsip responsibilitas dalam penelitian ini berpedoman kepada 2 (dua) poin berikut yaitu:

- Berpegang pada prinsip kehati-hatian prudential practices dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- 2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial

d. Independensi (Independency)

Prinsip responsibilitas dalam penelitian ini berpedoman kepada 2 (dua) poin berikut yaitu:

- Menghindari tekanan dari pihak tertentu serta bebas dari benturan kepentingan
- 2) Pengungkapan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan

e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)

Prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini berpedoman kepada 2 (dua) poin berikut yaitu:

- 1) Perlakuan setara kepada seluruh stakeholders
- 2) Kesempatan yang sama bagi seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan yang bermanfat bagi kepentingan perusahaan

Poin-poin di atas yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif maka dari itu penulis memiliki beberapa langkah dalam melakukan teknik analisis secara kualitatif yaitu:

- 1. Mengumpulkan data-data primer dari yayasan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi.
- 2. Hasil dari penelitian berupa data kemudian disorting (mengolah informasi yang diperoleh sehingga sistematis berdasarkan variabel yang diteliti) dengan cara mereduksi data yang diperoleh. Proses reduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan.
- 3. Menganalisis data melalui content analysis, yakni teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.
- 4. Menyajikan data dalam bentuk deskrpsi yang telah disusun dengan rapi.
- 5. Meminta pertimbangan kepada dosen pembimbing mengenai data-data yang diperoleh dari lapangan.

6. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis, apakah penerapan *Good*Corporate Governance di yayasan Bumimaitri telah sesuai dengan aspek yang ada di dalam pedoman umum Good Corporate Governance dan UU Yayasan.

3.7 Jadwal Penelitian

Gambar 3.7 Tabel Jadwal Penelitian

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN						
		NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	AGUSTUS
1	Penyusunan dan ujian proposal							
2	Pengurusan izin administrasi penelitian							
3	Pengumpulan data							
4	Analisis dan penafsiran data							
5	Penyusunan laporan akhir							
6	Uji hasil penelitian							
7	Perbaikan hasil penelitian							
8	Sidang skripsi							
9	Perbaikan hasil sidang skripsi							
10	Pengumpulan skripsi							

Sumber: Penulis (2019)

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. (2012). *Pedoman Penilaian Indikator/Parameter untuk Pengukuran Penerapan GCG BUMN*. Kedeputian Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Bunasor, S. (2011). The Golden Triangle of Control System in PT Bank Rakyat Indonesia. Economy Journal.
- Chatamarasjid, A. (2010). *Badan Hukum Yayasan* (4th ed.). Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti.
- Daniri, & Ahmad, M. (2013). *Ketika Governance Tak Lagi Menjadi Panglima*. Jakarta: Salemba.
- Dr.Munir Fuady, S.H., M. . (2012). *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (2nd ed.). jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Gumilang. (2009). *Penerapan Good Corporate Governance*. (B. P. U. Diponegoro, Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jayne, G. (2010). Accounting Theory. Australian Ltd.
- Kaihatu, & S, T. (2016). *Good Corporate Governance Dan Penerapannya di Indonesia* (8th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kansi, C. S. ., & Kansil, C. S. T. (2011). *Pokok-Pokok Badan Hukum*. (4, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. (2012). Akuntansi Yayasan. (Andi, Ed.). Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Peraturan UU Yayasan. (n.d.). Retrieved from https://www.putra-putri-indonesia.com/undang-undang-yayasan.html
- Salem, A. E. S., & Hisyam, M. (2012). The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms on Constraining Earning Management: Literature Review and Proposed Framework. *Global Business*.
- Samadani, A. (2013). Dasar-dasar hukum bisnis (1st ed.). Jakarta.
- Subekti. (2013). Hukum bisnis. Jakarta: PT. Citra Aditiya Bakti.

- Sugiyono. (2014). Metode penelitian AKuntansi. Bandung: Alfabeta.
- Sutojo, SIswanto, & Aldridge, E. J. (2015). *Good Corporate Governance* (2nd ed.). Bogor: PT Damar Mulia Pustaka.
- Suwarjono. (2011). *Akuntansi Pemeriksaan Pelaporam Tata Kelola Perusahaan* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Tjager, & Nyoman, I. (2013). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Undang-Undang Yayasan. (n.d.). Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl689/undangundang-yayasan-dan-lembaga-pendidikan
- Wulandari, & Ari, C. (2009). *Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-prinsip good corporate governance di PT Pupuk Kujang Nusantara*. Universitas Indonesia.
- Dwiridotjahjono, Jojok. (2010). Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia, Jurnal, Diakses 6 Agustus 2018, pada http://journal.unpar.ac.id.
- Hartanto, Welly. (2011). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Organisasi Nirlaba: Studi Kasus pada Gereja Bethany Lebak Arum di Surabaya, Skripsi S1, Diakses 5 Agustus 2018, pada http://repository.wima.ac.id/8674/.
- Putri, Bena Eka. (2014). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Purnama Semesta Alamiah*, Jurnal, Diakses 15 September 2018, pada http://studentjournal.petra.ac.id.
- Sari, Yessi Amanda. (2014). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Informasi Kinerja Keuangan*, Skripsi S1, Diakses 17 September 2018, pada http://repository.widyatama.ac.id.
- Sugiyono (2013). Metode Penelitian Pendidikan, Alfa Beta, Jakarta.
- Sugiyono (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfa Beta, Bandung.
- Billy Christian, Ronny H. Mustamu. (2013). Penerapan Prinsip—prinsip Good Corporate Governance: Studi Deskriptif Pada Perusahaan Keluarga Jasa Properti. AGORA

- Danang, Suntoyo. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung. PT Refika Aditama.
- Diana Istighfarin dan Ni Gusti Putu Wirawati. (2015). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*.E
 Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 13 No 2 PP: 546- 581 ISSN: 2302-8556.
- Effendi, Muh Arief. (2018). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh M. (2014). Manajemen Keuangan, Edisi 1. Yogyakarta. BPFE.
- Hermuningsih, Sri. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Publik di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.
- Hery. (2017). Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan. Jakarta. PT Gramedia.
- Hery. (2017). *Teori Akuntansi Pendekatan Konsel dan Analisis*. Jakarta. PT Grasindo, Anggota IKAPI.
- Prabowo, Muhammad Shidqon. (2018). *Dasar dasar Good Corporate Governance*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.
- Tatang Ary Gumanti. (2017). Keuangan Korporat Tinjauan Teori dan Bukti Empiris. Jakarta. MitraWacana Media.
- Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian Cetakan Pertama. Yogyakarta. PustakaBaru Press.
- Rismawati Simarmata. (2009). Evaluasi penerapan Good Corporate Governance pada Yayasan Pangudi Luhur Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

CURRICULUM VITAE

Biodata

Nama : Charvin

Tempat/Tanggal lahir: Tanjungpinang/12 April 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Kuantan Gang Putri Cempaka III Tanjungpinang

Nomor telepon : 0853 6443 7334

Status : Single

Riwayat Pendidikan

2003-2009: SDN 004 Bukit Bestari Tanjungpinang
 2009-2012: SMPS Maitreyawira Tanjungpinang
 2012-2015: SMKS Maitreyawira Tanjungpinang

• 2015-2019: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang

Program Studi S1-Akuntansi

Pengalaman Kerja

■ Guru Bahasa Inggris – SDS Maitreyawira Tanjungpinang 2015-2017

■ Staf Tata Usaha (TU) – SMPS Maitreyawira Tanjungpinang 2017-2019